

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Otonomi dimulai tahun 2001 yang di tandai dengan diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu landasan bagi pengembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga Undang-undang No. 22 tahun 1999 perlu di sesuaikan dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat

Dengan berlakunya Undang-undang No.33 Tahun 2004, otonomi daerah diharapkan menjadi solusi terbaik agar daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai rumah tangganya sendiri. tetapi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah dimana pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dll. Sebagian besar pendapatan asli daerah digolongkan kedalam pungutan (retribusi), bahkan untuk kabupaten atau kota, pungutan hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan retribusi daerah terbesar adalah retribusi pasar, rumah sakit dan klinik, izin bangunan dan terminal bus atau taksi, oleh karena itu pendapatan daerah sektor retribusi dikatakan cukup potensial dan mempunyai peran untuk meningkatkan pendapatan asli

daerah karena retribusi merupakan pembiayaan langsung dari rakyat kepada pemerintah yang terlihat dari adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah kota Gorontalo secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber pendapatan asli daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. Pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah, semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah

pusat semakin berkurang. untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Gorontalo Menurut Jenis Pendapatan (miliar rupiah) 2012–2017

Jenis Pendapatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34,22	43,06	124,72	142,09	172,31	182,88
1.1 Pajak Daerah	24,18	29,94	30,67	34,59	45,68	60,66
1.2 Retribusi Daerah	8,21	10,04	6,39	8,74	15,19	13,81
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,83	3,08	2,64	2,10	1,40	1,59
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	-	-	85,02	96,66	110,04	106,82

Sumber: BPS Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan komposisi struktur data PAD terlihat bahwa realisasi pendapatan pemerintah Kota Gorontalo menurut jenis pendapatan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 meningkat, serta bentuk pesentase kontribusinya disajikan pada tabel berikut.

Tabel . 1.2 Persentase Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo

Jenis Pendapatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.1 Pajak Daerah	70,66	69,53	24,59	24,34	26,51	33,16
1.2 Retribusi Daerah	23,99	23,31	5,12	6,15	8,81	7,55
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,34	7,15	212,74	1,47	0,81	0,86
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	-	-	68,16	68,02	63,86	58,40

Sumber: Data di olah

Berdasarkan tabel 1.2 di atas terlihat bahwa kontribusi pajak daerah menurun dari tahun 2012 sebesar 70,66% menjadi 24,34% pada tahun 2015, lalu naik pada tahun 2016 sebesar 26,51, dan menurun kembali pada tahun 2017 menjadi 33,16%. Sama halnya dengan retribusi

daerah pada tahun 2012 berkontribusi sebesar 23,99% menjadi 5,12% pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 naik menjadi 6,15%, pada tahun 2018 8,81%, lalu pada tahun 2017 menurun menjadi 7,55%. dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2012 sebesar 5,34% naik menjadi 212,74% pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 1,47% sampai pada tahun 2016 menjadi 0,81%, naik kembali pada tahun 2017 sebesar 0,86%. selanjutnya lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 68,16% menurun sampai tahun 2017 sebesar 58,40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi terhadap pendapatan asli daerah menurut jenis pendapatan dari tahun ketahun terlihat mengalami fluktuasi.

Sementara itu, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Termasuk dalam retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyedotan kakus, dll. Adapun jenis retribusi yang ada di kota Gorontalo dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014-2017

Uraian	2014			2015			2016			2017		
	Anggaran	Retribusi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Hasil Retribusi Daerah	15,294,043,252	6,391,918,637	-	21,741,588,408	12,215,334,53	-	19,888,828,600	15,187,824,984	-	21,200,983,495	13,655,177,324	-
Retribusi Jasa Umum	7,635,000,000	3,103,543,294	48,55	14,108,238,408	8,289,483,795	67,8	13,766,928,600	9,970,201,175	65,64	14,389,636,202	8,888,394,12	65,09
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.250.000,000	782,252,629	12,23	9,655,238,408	5,691,624,815	46,59	10,024,428,600	7,675,136,325	50,53	11,042,136,202	6,297,050,582	46,11
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500,000,000	221,227,250	3,46	1,300,000,000	395,706,500	3,23	800,000,000	254,773,750	1,67	1,200,000,000	704,972,500	5,16
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keluarga	25,000,000	21.230,000	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	230,000,000	165,504,000	2,58	360,500,000	61,918,000	0,50	405,000,000	171,860,000	1,13	365,000,000	264,140,000	1,93
Retribusi Pelayanan Pasar	2,015,000,000	1,371,110,500	21,45	2,025,000,000	1.531,637,3	12,53	2,025,000	1,461,796,100	9,62	1,435,000,000	1,124,038,050	8,23
Retribusi Pajak kendaraan bermotor	450,000,000	392,360,000	6,13	400,000,000	244,015,000	1,99	500,000,000	394,395,000	2,59	300,000,000	322,350,000	2,36
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	15,000,000	15,170,000	0,23	12,500,000	0,00	0,00		3,100,000	0,02	12,500,000	0,00	0,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	150,000,00	134,688,000	2,10	250,000,000	229,887,180	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa persentase dari berbagai jenis retribusi jasa umum yang pertama paling banyak berkontribusi terhadap retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan hal ini dibuktikan dari dari tabel 1.3 dimana pada tahun 2014 berkontribusi sebesar 12,23% dan pada tahun 2015 sebesar 46,59%, tahun 2016 sebesar 50, 53%, pada tahun 2017 sebesar 46,11%. yang kedua adalah retribusi pelayanan pasar hal ini dibuktikan pada tabel 1.3 dimana retribusi pelayanan pasar pada tahun 2014 berkontribusi sebesar 21,45%, pada tahun 2015 sebesar 12,53%, 2016 sebesar 9,62% dan tahun 2017 sebesar 8,23%., dan yang paling sedikit berkontribusi yaitu retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran di buktikan dari tabel 1.3 hanya berkontribusi pada tahun 2012 sebesar 0,23%.

Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa peralatan, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Kehidupan perkotaan yang semakin berkembang pesat menuntut menurut kualitas pelayanan di berbagai bidang termasuk perpasaran dan persaingan usaha yang kompetitif. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan bidang perpasaran, perlu mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan pasar-pasar milik pemerintah kota (Murniati & Dwi Kasasi).

Retribusi pelayanan pasar yang dibebankan kepada kepada masyarakat pedagang atau pembeli. Yaitu adanya pembayaran yang dilakukan oleh para pedagang kepada dinas pasar tersebut dikarenakan para pedagang telah menggunakan jasa Negara. Pembayaran ini dilakukan secara langsung sebagai akibat terjadi hubungan timbal balik antara pedagang yang menggunakan jasa Negara dengan dinas pasar yang menyediakan jasa untuk pelaksanaan perdagangan. Oleh karena sektor retribusi pasar menjadi salah satu faktor yang besar kontribusinya bagi pengendalian keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dimana kontribusi dari retribusi pelayanan pasar dari tahun ketahun mengalami penurunan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna untuk membantu dalam meningkatkan retribusi daerah, sehingga penulis tertarik mengambil judul **“Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa besar potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana perkembangan kontribusi retribusi pasar di Kota Gorontalo?
3. Berapa prediksi kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada tahun-tahun yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besar potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi retribusi pasar di Kota Gorontalo.
3. Mengetahui besar prediksi kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah diharapkan dapat berguna sebagai tambahan masukan dalam menyusun usaha peningkatan PAD, khususnya yang menyangkut penerimaan retribusi pasar terhadap PAD.
2. Bagi Universitas Negeri Gorontalo diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak yang berminat terhadap topik tentang retribusi pasar
3. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sekaligus menerapkan antara teori yang dipelajari dengan praktek dalam penyusunan ini